



PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON
INDONESIA



7 PROYEK IMPLEMENTASI

PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA



7 PROYEK
IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON
INDONESIA

Hak Cipta

© 2020 Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonesia

Dilarang memperbanyak/mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku dalam bentuk apapun tanpa seizin dari Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon Indonesia



PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON
INDONESIA

DAFTAR ISI

Prakata___2

Apa itu Pembangunan Rendah Karbon
& Agenda Pembangunan Global?___3

Indikator Hasil Pembangunan Rendah Karbon___4

Apa itu Proyek Pembangunan Rendah Karbon?___4

Proyek *Scaling Up*___5

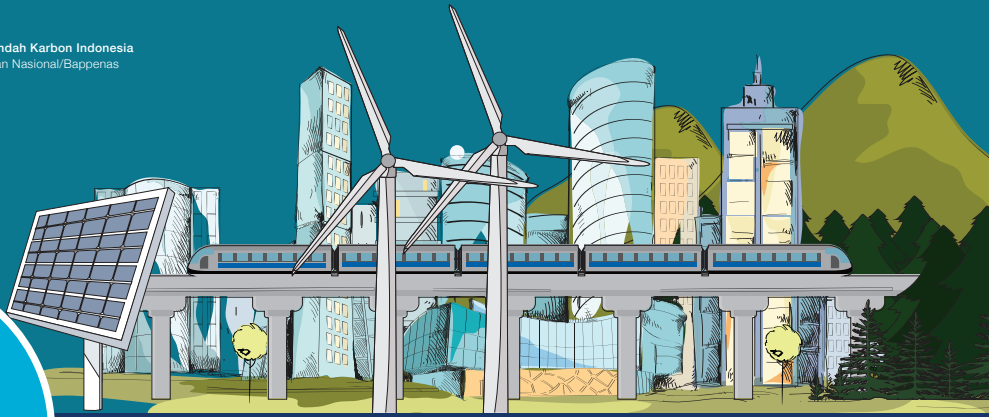
7 PROYEK IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA

- 1 Pemanfaatan Biogas untuk Pasokan Energi Rumah
Tangga___8
- 2 Rehabilitasi Hulu DAS Berbasis Masyarakat___10
- 3 Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga
Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau
Sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan
(HKm)___12
- 4 Ketahanan Pangan dan Peningkatan Ekonomi bagi
Masyarakat Rentan melalui Pertanian Berkelanjutan___14
- 5 Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Penanaman Padi
dengan metode *System of Rice Intensification* (SRI)___16
- 6 Model Reforma Agraria untuk Peningkatan Produktivitas
Sumber Daya Hutan___18
- 7 Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang sebagai Taman
Wisata Mangrove dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem
dan Sekuestrasi Karbon – Belitung Mangrove Park
(BMP)___20



Dr. Ir. Medrilzam, MPE

Direktur Lingkungan Hidup,
Kementerian PPN/Bappenas



Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetapi pada saat yang sama harus menjaga kualitas lingkungan yang menjamin ketersediaan sumber daya alam dan daya dukung sumber daya alam.

Pemerintah telah memulai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Intensitas emisi GRK. Inisiatif ini sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS), yang kita kenal dengan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Secara khusus, Pembangunan Rendah Karbon juga telah menjadi Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024.

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ini adalah *platform* baru untuk pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi GRK dan Intensitas emisi GRK, serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam kita. Dalam hal ini, intervensi kebijakan pembangunan yang memiliki manfaat untuk pengurangan emisi GRK dan Intensitas emisi GRK akan diprioritaskan. Kapasitas sumber daya alam termasuk emisi GRK dan Intensitas emisi GRK, tutupan lahan dan air menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan menetapkan target pembangunan rendah karbon.

Publikasi ini memberikan 7 contoh implementasi pembangunan rendah karbon. Proyek-proyek ini telah didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF). Selama periode 2010-2019, ICCTF telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait pengurangan emisi GRK dan Intensitas emisi GRK serta meningkatkan mata pencaharian dan ekonomi masyarakat lokal.

Prestasi yang ditampilkan dalam publikasi ini dikelompokkan dalam tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi yang mewakili sebagian dari banyak pencapaian turunan pada kegiatan proyek di lapangan.

Akhir kata, saya berharap pelajaran dari lapangan ini akan menginspirasi orang untuk lebih mengembangkan dan mengimplementasikan pembangunan rendah karbon.

Jakarta, Mei 2020



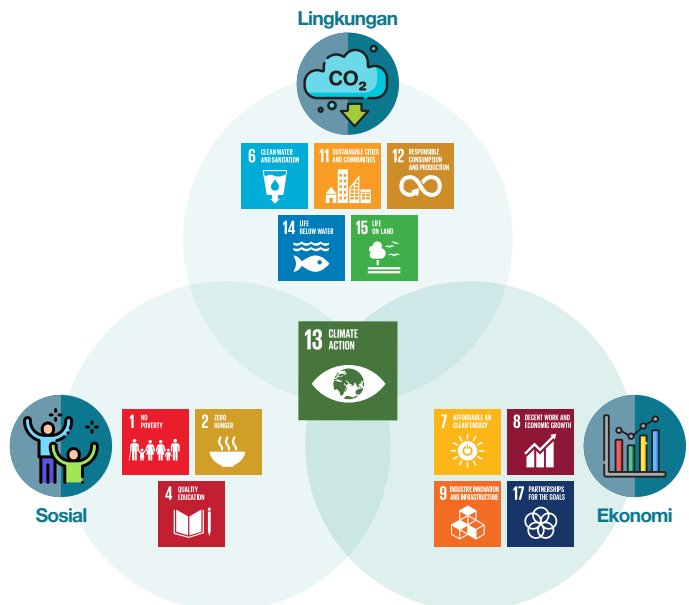
PEMBANGUNAN RENDAH KARBON/ *LOW CARBON DEVELOPMENT*

& AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL?



Pembangunan Rendah Karbon/*Low Carbon Development* (PRK/LCD) adalah *platform* pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam.

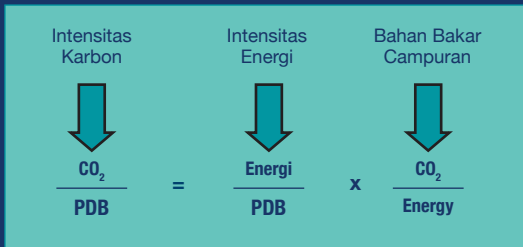
Pembangunan Rendah Karbon menempatkan Tujuan **Sustainable Development Goals** (SDGs) ke 13 (Aksi Perubahan Iklim) sebagai dasar utama untuk mendukung SDGs.





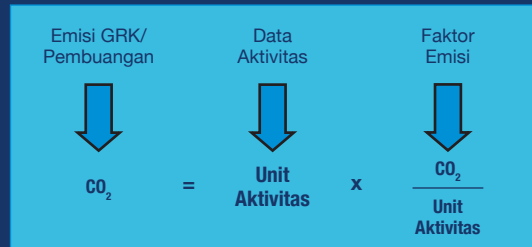
INDIKATOR HASIL PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Emisi/Intensitas Karbon



- Intensitas Emisi GRK (CO₂) adalah jumlah emisi GRK per unit *output* ekonomi, yang biasanya diukur melalui PDB di tingkat nasional.
- Intensitas energi adalah jumlah konsumsi energi per unit PDB.
- Campuran bahan bakar adalah Emisi GRK (CO₂) dari konsumsi energi di Indonesia.

Pengurangan Emisi GRK



- Data aktivitas adalah jumlah kegiatan pembangunan yang berpotensi menurunkan atau menyerap emisi di satu area dalam waktu tertentu. Misalnya: menanam pohon 1 juta ha/tahun.
- Faktor emisi adalah rata-rata emisi GRK untuk satu sumber emisi relatif terhadap unit aktivitas pada sumber emisi yang sama.
- Misalnya: faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 132,99 ton C/ha.



PROYEK PEMBANGUNAN RENDAH KARBON/ LOW CARBON DEVELOPMENT (PRK/LCD)

Proyek PRK/LCD adalah inisiatif kegiatan aksi penurunan emisi GRK dan intensitas emisi GRK yang secara langsung memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Proyek ini mencakup lingkup sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, limbah dan *blue carbon* sesuai dengan sektor prioritas PRK/LCD.

Sejak tahun 2010-2019, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan beberapa proyek percontohan PRK/LCD melalui Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan proyek percontohan ini rencananya akan dikembangkan dan direplikasi ke beberapa wilayah prioritas nasional sesuai dengan potensi serta kebutuhan wilayahnya. Mulai tahun 2020, pengembangan proyek PRK/LCD ini akan diutamakan pada provinsi yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Terdapat 7 provinsi prioritas sebagai percontohan implementasi PRK/LCD yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Riau dan Bali.



PROYEK SCALING UP

PAPUA BARAT

KEGIATAN	KEBUTUHAN
Pengelolaan kawasan pesisir Teluk Arguni di Kabupaten Kaimana	<i>Workshop</i> , penguatan kelompok, bantuan bibit, bantuan sarana wisata, modal awal
Pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Manokwari Selatan	<i>Workshop</i> , penguatan kelompok, bantuan alat, pupuk dan bibit

RIAU

KEGIATAN	KEBUTUHAN
Pertanian tanpa bakar dipadu dengan pertanian presisi di lahan gambut Kabupaten Palalawan	<i>Workshop</i> , bantuan alat, pupuk dan bibit

SULAWESI SELATAN

KEGIATAN	KEBUTUHAN
Sekolah Lapang Pertanian organik dan pertanian presisi dari Pangkep ke 6 kabupaten percontohan PRK	Pelatihan, biaya pelatihan dan bantuan peralatan telemetri, bantuan bibit dan pupuk melalui kelompok
Sekolah Pantai Indonesia & Sekolah Lapang Tambak dikembangkan di Pangkep	<i>Workshop</i> , biaya pelatihan, bibit mangrove, modal awal revitalisasi tambak melalui kelompok

PAPUA

KEGIATAN	KEBUTUHAN
Revegetasi/reboisasi lahan untuk ekowisata Kabupaten Timika	<i>Workshop</i> , studi banding, modal awal kelompok, peralatan pengolah sampah, sarana pembibitan
Pengelolaan limbah di Kabupaten Timika	<i>Workshop</i> , studi banding, modal awal kelompok, peralatan pengolah sampah



JAWA BARAT

KEGIATAN	KEBUTUHAN
Pengelolaan limbah (pertanian, wisata dan Pemukiman) oleh LMDH Puncak Lestari di Cisarua Kabupaten Bogor	<i>Workshop</i> , modal awal kelompok, peralatan pengolah sampah
Perhutanan sosial di lahan kritis DAS Hulu untuk wisata (Desa Mekarjaya, Arjasari Kabupaten Bandung & Desa Cikidang, Lembang, Bandung Barat)	<i>Workshop</i> , studi banding, modal awal kelompok, peralatan pengolah sampah, sarana pembibitan

JAWA TENGAH

KEGIATAN	KEBUTUHAN
Pengelolaan hutan produksi pada hulu DAS, pengembangan Kawasan dan komoditas lokal unggulan serta ekowisata di Kabupaten Pekalongan	<i>Workshop</i> , bantuan bibit, bantuan sarana wisata, modal awal
Pengelolaan limbah dan revegetasi mangrove di Kota Pekalongan	<i>Workshop</i> , biaya membangun biodigester, pendampingan LSM, bantuan bibit mangrove dan modal awal.
Pengelolaan limbah di Magelang	<i>Workshop</i> , biaya membangun biodigester dan kompos gas, workshop, pendampingan LSM, biaya membangun proses pengolahan, modal awal dan pemasaran.

BALI

KEGIATAN	KEBUTUHAN
Revegetasi mangrove di Kecamatan Gerokgak, Buleleng untuk wisata	<i>Workshop</i> , penguatan kelompok, bantuan bibit, bantuan sarana wisata, modal awal

7 PROYEK IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA

1

**Pemanfaatan Biogas
untuk Pasokan Energi
Rumah Tangga**

- Halaman 8

2

**Rehabilitasi Hulu DAS
Berbasis Masyarakat**

- Halaman 10

3

**Konservasi Ekosistem Nipah
dan Hutan Penyangga Bagian
Timur Suaka Margasatwa
Sungai Lamandau Sebagai
Kawasan Pencadangan Hutan
Kemasyarakatan (HKm)**

- Halaman 12

4

**Ketahanan Pangan dan
Peningkatan Ekonomi bagi
Masyarakat Rentan melalui
Pertanian Berkelanjutan**

- Halaman 14





PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON
INDONESIA

5 Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Penanaman Padi dengan metode *System of Rice Intensification (SRI)*

- Halaman 16

7 Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang sebagai Taman Wisata Mangrove dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem dan Sekuestrasi Karbon - Belitung Mangrove Park (BMP)

- Halaman 20

6 Model Reforma Agraria untuk Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Hutan

- Halaman 18





Pemanfaatan Biogas untuk Pasokan Energi Rumah Tangga

Mitra Pelaksana

SESAMI

Lokasi

Desa Keningar dan
Desa Ngargomulyo,
Magelang, Jawa Tengah

Mendukung SDGs



ICCTF bekerja sama dengan SESAMI (Sedya Samahita Memetri Indonesia) yang merupakan LSM lokal untuk memenuhi energi rumah tangga dengan memanfaatkan biogas.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi GRK dari limbah peternakan dengan cara menghasilkan energi terbarukan (biogas), limbah rendah emisi (*bioslurry*), dan kompos, dimana baik untuk kualitas tanah dan ekosistem, serta meningkatkan stok karbon (dari kegiatan revegetasi).

Melalui proyek ini, masyarakat setempat dilatih untuk membangun biodigester dan mengoperasikan pusat pembibitan. Proyek ini juga membantu masyarakat setempat untuk merehabilitasi lahan bekas tambang pasir dan menanam kembali dengan beragam macam pohon.

BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI

1

EKONOMI



Pendapatan tambahan masyarakat sebesar
Rp 3.000.000
/KK/bulan



Masyarakat desa mampu mendirikan
Koperasi Hijau



Biogas yang dihasilkan mengurangi biaya rumah tangga sebesar
Rp 60.000/bulan

2

LINGKUNGAN



Menurunkan emisi karbon sebesar
16.515
ton CO₂eq/tahun



10 Unit
Bio Digester
telah dibangun



35.085
Multi Purpose Tree Species
(MPTS) telah ditanam



17,8 hektar
Bekas Lahan Tambang direhabilitasi

3

SOSIAL



155 orang
terlibat dalam pemulihan lahan bekas tambang

Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/*scaling up* kegiatan
KLHK, Kemendesa, KemenESDM, Kementan





Rehabilitasi Hulu DAS Berbasis Masyarakat

Mitra Pelaksana
Konsorsium CFES

Lokasi
Jawa Barat

Mendukung SDGs



Hulu DAS Ciliwung (Ciliwung 0 Km) mengalami longsor dan banjir dikarenakan banyaknya hutan yang terdegradasi. Dengan status Hutan Produksi namun berada pada areal konservasi, sehingga perlu tetap dijaga kelestariannya sebagai daerah penyangga dan penampung air. ICCTF bekerja sama dengan Konsorsium Community Forest Ecosystem Service (CFES), PT Gaia Eko Daya Buana (GAIA-DB), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Puncak Lestari telah melakukan peningkatan kapasitas bagi kelompok masyarakat untuk melakukan rehabilitasi 100 ha lahan terdegradasi, pemetaan, SMART Patrol, penguatan kelembagaan, pembuatan dokumentasi dan publikasi. Lahan yang direhabilitasi ini akan diajukan sertifikasi Plan Vivo untuk menjaga cadangan karbonnya. Selain itu, masyarakat juga dilatih tentang pemanfaatan hasil hutan lainnya sehingga memiliki nilai guna yang cepat melalui jasa lingkungan (wisata) dan sumber daya hutan non kayu.

BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI



DAMPAK LAINNYA

Scaling-up 2019 melalui bantuan dari PLN, JAMKRINDO, SIL-UI berupa tanaman keras (buah-buahan, gaharu, dll). 2020 akan mendapat bantuan sarana pengelolaan sampah dari JAMKRINDO

Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scaling up kegiatan
KemenBUMN, Kementan, KemenPUPR, KLHK





Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Mitra Pelaksana

Yayasan Orang Utan Indonesia (Yayorin)

Lokasi

- Desa Tanjung Putri, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- Desa Tanjung Terantang, Kab. Kotawaringin Barat Kel. Mendawai, Kab. Kotawaringin Barat dan Kel. Mendawai Seberang, Kab. Kotawaringin Barat.

Mendukung SDGs



Proyek ini bertujuan untuk menghemat degradasi hutan dengan luas total 400 ha dan menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar. Dalam proyek ini, ICCTF bekerja sama dengan Yayorin (Yayasan Orangutan Indonesia) di Kalimantan Tengah. Yayorin sejak 2012 mendorong masyarakat membentuk kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berperan aktif mengelola dan menjaga kawasan hutan secara lestari. Skema HKm dipilih sebagai strategi untuk mempertahankan kawasan hutan bergambut penyangga tidak beralih fungsi guna peruntukan area perluasan perkebunan sawit dan mempertahankan hutan rawa bergambutnya sebagai area penyimpan/penyerap emisi karbon.

BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI

1 EKONOMI



Meningkatkan produksi padi dari 2 ton/ha/tahun menjadi **6 ton/ha/tahun**



Terciptanya ekonomi alternatif & ketahanan pangan melalui pengembangan usaha perikanan



Peningkatan ekonomi masyarakat sebesar **Rp 1.000.000** /keluarga/bulan

2 LINGKUNGAN



Potensi Penurunan Emisi sebesar **807.400** ton CO₂eq/tahun above ground



Dukungan konservasi meningkat yang disertai dengan mekanisme kerjasama untuk upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan dan bergambut penyangga SM Lamandau

3 SOSIAL



Berhentinya budaya pertanian dengan membakar lahan



Kelompok HKm memiliki wawasan mengenai sistem pengelolaan & pengawasaan HKm wilayah blok penyangga





Ketahanan Pangan dan Peningkatan Ekonomi bagi Masyarakat Rentan melalui Pertanian Berkelanjutan

Mitra Pelaksana

Yayasan FIELD

Lokasi

Sulawesi Selatan

Mendukung SDGs



Terdapat 400 ha tambak udang di desa Kanaungan di Kecamatan Labakkang, Pangkep, Sulawesi Selatan yang selalu mengalami gagal panen. Penggunaan pupuk kimia terus menerus meningkat, sedangkan pendapatan petani menurun. ICCTF bekerja sama dengan Yayasan FIELD melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi pangan berkelanjutan dan ekonomi bagi masyarakat yang rentan. Sekolah Lapang Tambak telah didirikan untuk menghentikan penggunaan pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk organik. Sekolah Lapang Pertanian juga dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas padi dan hortikultura. Penanaman mangrove di area akuakultur juga telah dilakukan. Selain itu, masyarakat juga berhasil menerapkan pertanian padi dan hortikultura pekarangan secara organik dengan membuat pupuk mandiri. Proyek ini telah menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal dan mengurangi biaya produksi.

BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI

1

EKONOMI



Pendapatan tambahan
Rp 1.000.000/bulan
dari polikultur organik
udang & ikan



Peningkatan hasil
panen padi dari
5,3 ton/ha menjadi
8 ton/ha



Penghematan
pengeluaran keluarga
untuk belanja sayur
Rp 150.000
/bulan/KK (75 KK)

2

LINGKUNGAN



Menurunkan
emisi GRK sebesar
43,85
ton CO₂eq/tahun



Penanaman Padi dari
1x pertahun menjadi
2X setahun



Penghasil **Pupuk Organik** untuk
tambak & Pertanian



10 hektar
tambak organik telah
dikembangkan

3

SOSIAL



Meningkatkan kapasitas
masyarakat rentan
di darat dan pesisir



Partisipasi komunitas
di daerah pengelolaan
Pertanian lahan kering
dan pesisir lokal

Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scaling up kegiatan
KemenBUMN, Kementan, KemenPUPR, Kemendesa, Kemendagri

DAMPAK LAINNYA

Scaling-up melalui dana *in-kind* dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, dan masyarakat. Sertifikasi organik hortikultura dari Pembiayaan Kementerian Pertanian. Bantuan alat Pertanian (*combine harvester*) dari Kementerian Pertanian.



5 Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Penanaman Padi dengan metode *System of Rice Intensification (SRI)*

Mitra Pelaksana

Fakultas Teknologi Pertanian -
Universitas Gadjah Mada

Lokasi

Kabupaten Kupang, NTT
(Nusa Tenggara Timur)

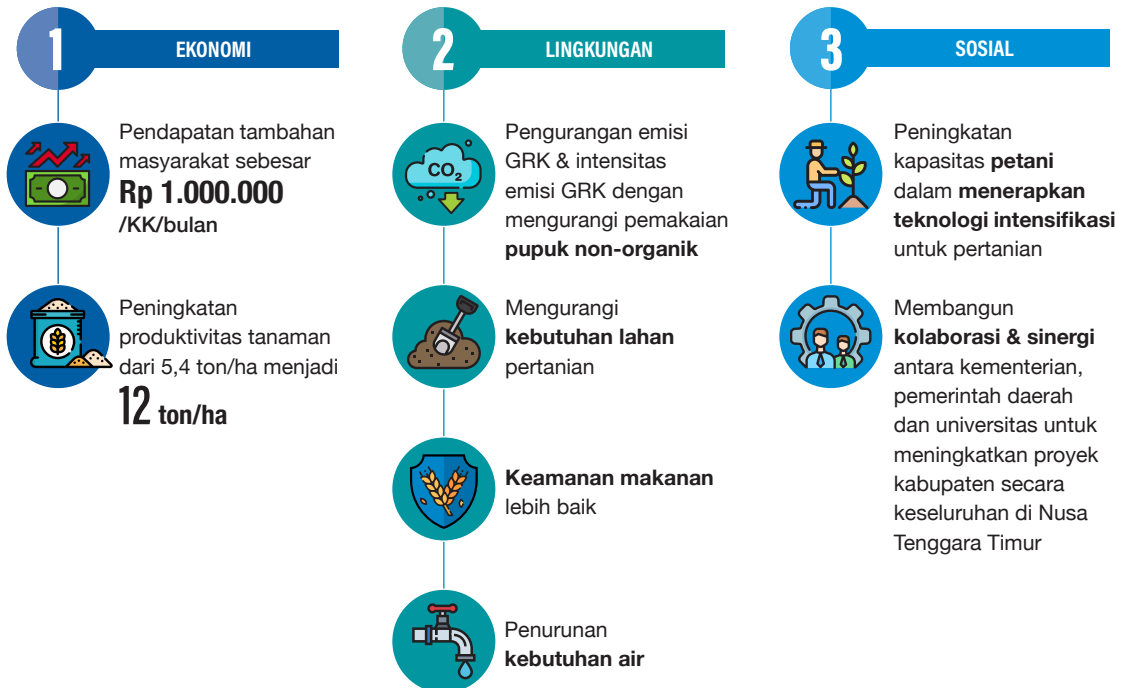
Mendukung SDGs



ICCTF bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada yang mengembangkan inovasi untuk meningkatkan hasil panen dan mengatasi masalah keterbatasan air.

Proyek ini membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk beradaptasi dalam perubahan iklim dengan merumuskan prediksi iklim untuk 30 tahun ke depan dan memasukkan metode penanaman SRI ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Proyek ini juga membantu petani dan masyarakat setempat untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan pertanian untuk meningkatkan produktivitas.

BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI



Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scaling up kegiatan
Kementan, Kemendesa, Kemenristekdikti, KemenPUPR



6 Model Reforma Agraria untuk Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Hutan

Mitra Pelaksana

Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada

Lokasi

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan & Pelatihan Universitas Gadjah Mada di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Mendukung SDGs



Proyek ini bertujuan melakukan reforma agraria untuk peningkatan produktivitas hutan dalam upaya percepatan pencapaian kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan serta pengurangan emisi GRK dan intensitas emisi GRK. Dalam proyek ini, ICCTF bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada (UGM) di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Blora, Jawa Tengah dan Ngawi, Jawa Timur. Fakultas Kehutanan UGM, mendorong masyarakat untuk mengadopsi *Integrated Forestry and Farming System* (IFFS) pada lahan *demonstration plot* seluas 500 ha di 8 LMDH. Masyarakat juga diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam mengelola hutan dalam bentuk Sekolah Lapang yang diikuti 224 orang anggota LMDH.

BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI

1 EKONOMI

Hasil panen padi lahan kering & jagung hibrida mencapai produktivitas **7,5 ton/ha**

Peningkatan ekonomi masyarakat sebesar **Rp 7.500.000 /KK/bulan**

2 LINGKUNGAN

Potensi Penurunan Emisi sebesar **89.456,25 ton CO₂eq/tahun** pada tahun ke-10

Menjaga daerah tangkapan air Sungai Bengawan Solo

Dukungan konservasi dari para pihak seperti BPDAS Solo melakukan penanaman di area 600 ha & alokasi Dana Desa untuk penyiapan pembibitan

3 SOSIAL

Kelompok LMDH memiliki **wawasan mengenai IFFS** sehingga mampu menyelaraskan antara pemanfaatan hutan & Pertanian yang lestari

Dukungan akses dari PU dengan memperbaiki jalan Blora - Ngawi

Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/scaling up kegiatan
KLHK, Kementan, Kemendesa





Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang sebagai Taman Wisata Mangrove dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem dan Sekuestrasi Karbon - Belitung Mangrove Park (BMP)

Mitra Pelaksana

Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI)

Lokasi

Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung

Mendukung SDGs



Kegiatan penambangan di Belitung telah menyebabkan degradasi yang signifikan bagi ekosistem pesisir dan bakau. Situasi ini telah memotivasi ICCTF dan TERANGI, sebuah LSM lokal untuk bekerja sama dalam melestarikan taman bakau sebagai upaya untuk mengurangi degradasi ekosistem pesisir dan meningkatkan penyerapan karbon. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Belitung.

Proyek ini telah menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat lokal dalam hal konservasi ekosistem mangrove serta manfaat ekonomi dari ekowisata mangrove.

Keberhasilan proyek ini telah menarik perhatian kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk berinvestasi dan meningkatkan proyek.

BEBERAPA DAMPAK PENTING DARI PROYEK INI

1

EKONOMI



Meningkatkan pendapatan 25 keluarga dan PAD Kabupaten Belitung



Memperbaiki penghasilan untuk masyarakat hingga 5 kali/bulan (dari Rp 3 juta/tahun meningkat menjadi **Rp 2 juta/bulan**) dari *Ecotourism* (jalur mangrove, pendidikan lingkungan dan *camping ground*)

2

LINGKUNGAN



Potensi Penurunan Emisi sebesar **220.200** tCO₂eq/tahun



Memulihkan **50 hektar ekosistem bakau** di situs pasca-tambang



Memulihkan **150 hektar ekosistem hutan pesisir** bantuan bibit BPDAS

3

SOSIAL



Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam **mengelola ekowisata**



Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kawasan konservasi pesisir setempat (KKPD) dan Taman Mangrove Belitung



Terciptanya **sarana ekowisata** dan **pendidikan** tentang mangrove

Kementerian/Lembaga yang berpotensi untuk mereplikasi/*scaling up* kegiatan
KLHK, KKP, Kemenparekraf






PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA


Sekretariat

PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

 Lippo Kuningan Building, Lantai 15
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
Jakarta 12940, Indonesia

 communication@lcdi-indonesia.id

 +62 (21) 8067 9314

 lcdi-indonesia.id

 [lcdi.id](https://www.instagram.com/lcdi.id)  [@lcdi.id](https://www.facebook.com/lcdi.id)  [@LCDI_Indonesia](https://twitter.com/LCDI_Indonesia)  [Low Carbon Development Indonesia](https://www.youtube.com/Low Carbon Development Indonesia)